

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha.....	15
B. Tinjauan Pendekatan Hukum Persaingan Usaha	16
1. Pendekatan <i>Per se Illegal</i>	16
2. Pendekatan <i>Rule of Reason</i>	17
C. Pembuktian dalam Persaingan Usaha	18
1. Direct Evidence	18
2. Indirect Evidence	19
D. Tinjauan Umum Persekongkolan Tender di Indonesia	20
1. Pengertian Persekongkolan Tender menurut Hukum Indonesia.....	20
2. Dasar Hukum Persekongkolan Tender di Indonesia.....	21
3. Indikasi Adanya Persekongkolan Dalam Tender.....	22
4. Jenis-Jenis Persekongkolan Tender.....	31
E. Tinjauan Umum Persekongkolan Tender di Singapura	33

1.	Pengertian Persekongkolan Tender menurut Hukum Singapura	33
2.	Dasar Hukum Persekongkolan Tender di Singapura	34
F.	Tinjauan Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha.....	36
1.	Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	36
2.	Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha di Singapura	38
BAB III METODE PENELITIAN		40
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	40
B.	Bahan penelitian.....	41
C.	Teknik dan Pengumpulan Data	43
D.	Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		45
A.	Perbandingan Penegakan Hukum Persaingan Usaha antara Indonesia dan Singapura berdasarkan Kasus Persekongkolan Tender pada Putusan KPPU No. 18/KPPU-L/2023 dan CCCS Case Number 700/003/15	45
1.	Penegakan Hukum Persekongkolan Tender di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	45
2.	Penegakan Hukum dalam Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida.....	56
3.	Penegakan Hukum Persekongkolan Tender di Singapura oleh Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS).....	74
4.	Penegakan Hukum dalam Putusan CCCS Case Number 700/003/15 tentang <i>Bid-Rigging</i> dalam Tender Layanan Listrik dan Penandaan Aset ...	81
5.	Perbandingan Penegakan Hukum Persekongkolan Tender antara Indonesia dan Singapura dalam Kasus <i>a quo</i>	91
B.	Aspek Pembelajaran yang Dapat Diambil dari Perbandingan Penegakan Hukum Persaingan Usaha terkait Persekongkolan Tender antara Indonesia dan Singapura Bagi Indonesia Dalam Memperkuat Dasar Hukum Persaingan Usaha Nasional.....	103
BAB V PENUTUP.....		113

A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
Daftar Pustaka.....	116